

## Hasil Analisis SWOT Masalah Transparansi dalam Manajemen Humas yang Ada di Pohuwato

Muh. Wahyuddin S. Adam<sup>1\*</sup>, Putri Adeliya Masiu<sup>2</sup>, Nurhalifa Nengo<sup>3</sup>, Siti Nurminawati<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Administrasi Pendidikan, Universitas Pohuwato, Indonesia.

Alamat: Jl. Trans Sulawesi No. 147, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Indonesia.

Korespondensi penulis: [wahyoadam@gmail.com](mailto:wahyoadam@gmail.com)\*

**Abstract:** Public information transparency is a crucial element of good governance principles. Pohuwato Regency, one of the administrative regions in Gorontalo Province, continues to face significant challenges in implementing public information disclosure. The role of the Regional Government's Public Relations (PR) division in disseminating information has not functioned optimally, as indicated by the limited public access to important and strategic governmental information. This study aims to analyze transparency issues in Pohuwato using a SWOT analysis approach (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). The research employs a descriptive qualitative method through interviews with PR officials, staff from the Communication and Information Office (Kominfo), and members of the community. The findings indicate that there is internal potential to be developed, such as the commitment of some officials to serve the public. However, weaknesses persist, including inadequate infrastructure and budgetary support. Opportunities to enhance transparency exist through the utilization of digital technology and national policy support, yet these are challenged by low information literacy among the public and a culture of bureaucratic secrecy. In conclusion, public information transparency in Pohuwato requires comprehensive and sustainable reform in public relations management.

**Keywords:** Transparency, Public Information, Public Relations, SWOT, Pohuwato

**Abstrak :** Transparansi informasi publik merupakan bagian penting dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kabupaten Pohuwato sebagai salah satu daerah administratif di Provinsi Gorontalo masih menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Peran Humas Pemerintah Daerah dalam menyampaikan informasi belum berjalan maksimal, yang ditandai dengan rendahnya akses masyarakat terhadap informasi penting dan strategis dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah transparansi di Pohuwato melalui pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan teknik wawancara terhadap pejabat Humas, staf Dinas Kominfo, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi internal yang dapat dikembangkan, seperti komitmen sebagian pejabat untuk melayani publik, namun juga terdapat kelemahan seperti kurangnya sarana prasarana dan dukungan anggaran. Peluang penguatan transparansi terbuka melalui pemanfaatan teknologi digital dan kebijakan nasional, tetapi juga dihadapkan pada ancaman rendahnya literasi informasi masyarakat dan budaya birokrasi tertutup. Kesimpulannya, transparansi informasi di Pohuwato memerlukan reformasi manajemen kehumasan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Transparansi, Informasi Publik, Humas, SWOT, Pohuwato

### 1. PENDAHULUAN

Transparansi adalah salah satu prinsip yang sangat penting dalam mengelola pemerintahan yang baik (good governance). Prinsip ini merujuk pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada publik, yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai kebijakan, kegiatan, serta penggunaan anggaran negara. Dalam konteks pemerintahan, transparansi memainkan peran yang sangat krusial, karena dapat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat partisipasi publik, dan mengurangi

kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa. Transparansi juga menjadi bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya (Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024)

Lebih lanjut, transparansi dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada badan publik untuk menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. UU ini juga mengatur mekanisme agar masyarakat dapat mengajukan permintaan informasi kepada instansi pemerintah dan badan publik lainnya yang terlibat dalam pengelolaan dana negara. Dengan demikian, transparansi diharapkan menjadi pilar utama yang menjamin hak-hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kehidupan mereka, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara. (Berliani et al., 2024)

Namun, meskipun dasar hukum terkait transparansi informasi sudah jelas dan diatur dalam perundang-undangan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling sering dihadapi adalah kurangnya komitmen dari instansi pemerintah untuk melaksanakan keterbukaan informasi. Bahkan, di banyak daerah, badan publik belum sepenuhnya memenuhi kewajiban transparansi ini, baik dalam hal penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, maupun dalam hal kualitas informasi yang diberikan.

Salah satu contoh nyata dari masalah transparansi informasi yang terjadi di Indonesia adalah rendahnya skor yang diperoleh negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang disusun oleh Transparency International. Berdasarkan laporan CPI tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-110 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100. Skor yang rendah ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih banyak ditemukan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Contoh yang paling mencolok dari masalah transparansi ini adalah berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, di mana banyak informasi terkait anggaran dan keputusan-keputusan penting yang tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Kasus-kasus seperti BTS Kominfo 2023, yang melibatkan penggunaan dana negara sebesar triliunan rupiah dalam proyek pembangunan menara BTS yang tidak transparan dalam pelaporannya, menjadi contoh nyata bagaimana rendahnya transparansi dapat memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Selain itu, penyalahgunaan dana desa di berbagai daerah juga menunjukkan betapa buruknya pengelolaan informasi publik di tingkat

lokal, yang berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri. Selain itu, banyak kebijakan dan keputusan yang tidak dipublikasikan dengan jelas, sehingga masyarakat tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan dana yang telah mereka setorkan melalui pajak dan kontribusi lainnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya transparansi di Indonesia cukup beragam. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran dan komitmen dari pejabat pemerintah untuk melaksanakan prinsip keterbukaan. Banyak pejabat yang masih menganggap informasi terkait kebijakan publik sebagai sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya, sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui bagaimana keputusan-keputusan tersebut dibuat dan apakah keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang benar dan akuntabel. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi kendala dalam penyediaan informasi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal dalam hal pengembangan teknologi informasi.

Meskipun demikian, sejumlah daerah di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi informasi. Beberapa daerah sudah mulai menerapkan platform Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMPEG) dan portal transparansi anggaran yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintah. Namun, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban ini dengan baik. Salah satu daerah yang mengalami masalah signifikan terkait transparansi adalah Kabupaten Pohuwato yang terletak di Provinsi Gorontalo.

Di Kabupaten Pohuwato, meskipun sudah ada regulasi mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam menyebarkan informasi publik, praktik transparansi masih sangat minim. Salah satu masalah besar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih untuk mengelola dan menyebarluaskan informasi secara efektif. Di Kabupaten Pohuwato, terutama di Kecamatan Marisa, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten, masih banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya platform digital yang memadai dan kurangnya perangkat keras seperti komputer dan jaringan internet yang diperlukan untuk memperbarui dan menyebarluaskan informasi secara real-time. Bahkan, masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang kebijakan pembangunan atau laporan anggaran pemerintah harus melalui prosedur yang panjang dan terkadang tidak jelas.

Selain itu, masalah disinformasi dan misinformasi juga menjadi ancaman yang besar bagi transparansi di daerah ini. Ketika pemerintah tidak dapat menyediakan informasi yang jelas dan akurat, masyarakat cenderung bergantung pada informasi yang beredar di media

sosial atau mulut ke mulut, yang seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini menyebabkan kebingungannya masyarakat dalam menilai kebijakan atau program-program pemerintah, dan bahkan dapat menurunkan kepercayaan mereka terhadap pemerintah.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Marisa, untuk memperbaiki manajemen informasi publik mereka. Penyediaan informasi yang transparan tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga akan memperkuat akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh manajemen Humas Pemerintah Daerah Pohuwato dalam melaksanakan transparansi informasi publik.

Dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), artikel ini akan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi transparansi di Kabupaten Pohuwato, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem komunikasi publik di daerah tersebut. Diharapkan hasil dari analisis ini dapat memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam memperbaiki transparansi informasi, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program pemerintah. (Sekedang & Napitupulu, 2025)

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu wawancara dan analisis SWOT. Kedua metode ini dipilih untuk menggali informasi secara mendalam mengenai masalah transparansi dalam manajemen Humas di Pemerintah Daerah Pohuwato, serta untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi transparansi informasi publik di daerah tersebut. (Amelia Suci Pertiwi & Dety Mulyanti, 2023)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan transparansi informasi publik di Pohuwato, seperti pejabat Humas Pemerintah Daerah Pohuwato, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta masyarakat umum yang menjadi penerima informasi. Tujuan wawancara adalah untuk menggali kondisi transparansi informasi yang ada, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mencari pemahaman lebih dalam mengenai pandangan berbagai pihak terkait mengenai transparansi informasi. Wawancara ini menggunakan teknik semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan

utama namun tetap memberi kesempatan bagi informan untuk memberikan tanggapan yang lebih bebas dan mendalam mengenai topik yang dibahas. Informan yang diwawancarai mencakup pejabat dari Pemerintah Daerah Pohuwato, dinas terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, serta masyarakat sebagai pihak yang berhak memperoleh informasi publik. Hasil wawancara akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan teknik transkripsi dan koding untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul, kemudian disusun dalam bentuk narasi yang menggambarkan situasi transparansi di Pohuwato. (Wakhidah & Nina, 2024)

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi implementasi transparansi di Pemerintah Daerah Pohuwato. Analisis SWOT terdiri dari empat elemen utama: kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats). Melalui analisis SWOT, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola transparansi, mengungkap kelemahan yang menghambat implementasi transparansi, mengeksplorasi peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan, dan menilai ancaman yang bisa menghalangi tercapainya tujuan transparansi. Proses analisis SWOT dimulai dengan mengidentifikasi kekuatan internal seperti kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keterbukaan informasi dan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selanjutnya, kelemahan internal yang dihadapi akan dianalisis, seperti keterbatasan anggaran, infrastruktur yang belum memadai, atau sumber daya manusia yang kurang terlatih. Dalam analisis peluang, faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong keterbukaan informasi akan dieksplorasi. Terakhir, analisis ancaman akan melihat faktor eksternal yang dapat menghambat transparansi, seperti perubahan regulasi atau ketidaksiapan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka. (Zainuri & Budi Setiadi, 2023)

Dengan menggabungkan wawancara dan analisis SWOT, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai masalah transparansi informasi publik di Kabupaten Pohuwato. Wawancara memberikan informasi langsung dari para pihak yang terlibat, sedangkan analisis SWOT membantu peneliti untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi baik dari sisi internal maupun eksternal. Hasil dari kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai kondisi transparansi di Pohuwato, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan transparansi informasi publik yang lebih efektif dan efisien. (Bagaskara & Rohmadi, 2024)

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa masalah transparansi dalam manajemen kehumasan Pemerintah Daerah Pohuwato merupakan isu yang belum teratasi secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah petugas dari bagian informasi dan komunikasi publik serta masyarakat dari Kecamatan Marisa, ditemukan bahwa ketersediaan informasi publik belum merata dan tidak disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keterbukaan informasi publik sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 28F UUD 1945.

Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi seputar kegiatan pemerintahan, penggunaan anggaran, dan perencanaan pembangunan. Minimnya akses ini membuat masyarakat kerap kali tidak mengetahui secara pasti arah kebijakan pemerintah maupun pelaksanaan program yang menyangkut kehidupan mereka secara langsung. Imbasnya, muncul ketidakpercayaan, keresahan, serta potensi tersebarnya informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Syahdiyah Sugiartia, 2023)

Analisis SWOT terhadap sistem kehumasan di Pohuwato mengungkapkan adanya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi jalannya komunikasi publik. Kekuatan utama berada pada legalitas struktural yang sudah terbentuk. Secara kelembagaan, bagian humas pemerintah daerah telah berdiri dan memiliki dasar hukum yang jelas, dengan struktur organisasi yang seharusnya mampu menunjang aktivitas komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, kelemahan paling mencolok terletak pada aspek pelaksanaan dan pengelolaan informasi. Berdasarkan wawancara dan data lapangan, banyak kanal informasi resmi seperti website pemerintah daerah yang jarang diperbarui. Media sosial resmi juga tidak dikelola secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi publik belum menjadi prioritas dalam manajemen pemerintahan. Pegawai di bagian kehumasan tidak seluruhnya memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan jurnalistik, yang seharusnya menjadi keahlian dasar dalam mengelola konten komunikasi publik. (Imam Zuhri et al., 2024)

Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran. Dalam wawancara dengan petugas terkait, diungkapkan bahwa kegiatan komunikasi publik sering kali tidak termasuk dalam prioritas penganggaran tahunan. Akibatnya, sarana dan prasarana seperti komputer, koneksi internet, kamera dokumentasi, dan alat penyuntingan konten tidak tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai. Hal ini menyebabkan informasi yang diproduksi tidak hanya minim, tapi juga tidak menarik perhatian publik karena tampilan yang tidak profesional.

Kecamatan Marisa, yang menjadi pusat pemerintahan Pohuwato, merupakan lokasi utama penelitian karena di daerah inilah sebagian besar aktivitas pemerintahan berlangsung. Sayangnya, justru di daerah ini ditemukan fakta bahwa masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. Beberapa warga mengaku baru mengetahui program bantuan sosial setelah masa pendaftaran berakhir, karena tidak adanya pengumuman resmi yang tersebar melalui kanal komunikasi publik. Informasi semacam ini hanya tersebar dari mulut ke mulut, yang rentan terhadap distorsi dan salah tafsir.

Dari sisi peluang, sebenarnya Pemerintah Pohuwato memiliki kesempatan besar untuk meningkatkan komunikasi publik melalui pemanfaatan teknologi. Akses masyarakat terhadap internet di Pohuwato semakin tinggi. Banyak masyarakat, terutama kalangan muda, memiliki perangkat digital dan mengakses informasi melalui media sosial. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat menjadikan pemerintah sebagai sumber informasi utama yang dapat dipercaya dan diandalkan.

Namun ancaman yang dihadapi juga tak kalah besar. Disinformasi dan hoaks menjadi ancaman nyata ketika ruang informasi yang sah dan terpercaya tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kurangnya kanal informasi resmi membuat masyarakat cenderung mempercayai sumber tidak resmi, seperti grup media sosial yang tidak memiliki verifikasi informasi. Dalam kondisi semacam ini, rumor berkembang menjadi opini, dan opini menjadi persepsi publik yang sulit dibantah walaupun keliru.

Hasil wawancara dengan beberapa warga menunjukkan bahwa mereka sering kali merasa tertinggal informasi dibanding masyarakat dari daerah lain. Mereka menilai pemerintah daerah kurang responsif dan tidak cukup terbuka, apalagi dalam hal-hal yang menyangkut anggaran pembangunan. Bahkan beberapa di antaranya menyatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana caranya mengakses informasi resmi pemerintah, atau kepada siapa harus mengajukan permintaan informasi publik.

Dari sisi internal pemerintah sendiri, budaya keterbukaan belum sepenuhnya terbangun. Masih ada anggapan bahwa informasi bersifat eksklusif dan hanya boleh diakses oleh kalangan tertentu. Ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong transparansi sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam wawancara dengan pegawai, terungkap bahwa tidak semua dari mereka memahami peran dan tanggung jawab dalam menyebarluaskan informasi. Banyak yang belum mengetahui bahwa mereka dapat menjadi bagian dari sistem pelayanan informasi publik.

Sebagai solusi strategis, perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas pegawai, khususnya di bidang pengelolaan media digital dan

penyampaian informasi publik. Selain itu, perencanaan komunikasi publik harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD, agar memiliki kekuatan anggaran yang sah dan terencana.

Peningkatan transparansi juga harus disertai dengan pembangunan infrastruktur informasi, seperti pembuatan pusat informasi publik di setiap kecamatan, pengembangan aplikasi pelayanan informasi berbasis mobile, serta penguatan kolaborasi dengan media lokal untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara cepat dan terpercaya. Di samping itu, perlu ada mekanisme evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas sistem informasi publik dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat akan tumbuh secara signifikan jika didukung oleh keterbukaan informasi yang memadai. Ketika masyarakat tahu program apa yang sedang direncanakan dan bagaimana anggaran digunakan, maka kepercayaan akan tumbuh dan partisipasi pun meningkat. Ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang inklusif dan demokratis. (Santri et al., 2023)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa reformasi dalam manajemen kehumasan bukan hanya kebutuhan administratif, melainkan keharusan dalam membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Diperlukan komitmen dari seluruh unsur pemerintahan untuk menjadikan informasi sebagai hak publik, bukan sekadar fasilitas tambahan. Ke depan, transparansi di Pohuwato harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah, bukan hanya program yang datang dan pergi.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi informasi publik di Kabupaten Pohuwato masih jauh dari harapan dan belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam konteks manajemen kehumasan pemerintah daerah, peran penyedia informasi kepada masyarakat belum dijalankan secara efektif, yang ditandai dengan minimnya ketersediaan media informasi yang dikelola secara profesional, keterbatasan teknologi penunjang, serta kurangnya keterampilan dan komitmen aparatur dalam menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan terbuka.

Dari hasil wawancara dan analisis SWOT, ditemukan bahwa masih ada kekuatan internal yang dapat dimaksimalkan, seperti adanya struktur kelembagaan humas yang sudah terbentuk dan komitmen beberapa aparat untuk menjalankan fungsi layanan informasi. Namun, kelemahan juga cukup dominan, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten



dalam bidang komunikasi publik, kurangnya alokasi anggaran, minimnya sarana dan prasarana seperti perangkat teknologi informasi yang memadai, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

Peluang yang tersedia cukup menjanjikan, khususnya dengan adanya dorongan kebijakan nasional terhadap digitalisasi layanan pemerintahan, serta meningkatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang transparan. Namun, peluang ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Ancaman nyata yang dihadapi adalah rendahnya literasi informasi masyarakat, masih kuatnya budaya birokrasi yang tertutup, serta tingginya risiko penyebaran hoaks akibat kekosongan informasi resmi dari pihak pemerintah.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk mereformasi sistem manajemen kehumasan, antara lain dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan, menyediakan anggaran khusus yang mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi, serta membangun dan mengembangkan infrastruktur digital seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi layanan informasi publik yang terintegrasi.

Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara Dinas Kominfo dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap unit kerja memiliki pemahaman dan tanggung jawab yang sama terhadap keterbukaan informasi. Edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka memahami hak-hak informasinya serta mampu membedakan antara informasi resmi dan informasi yang menyesatkan. Pelibatan media lokal, LSM, dan institusi pendidikan dalam upaya peningkatan literasi informasi dan pengawasan partisipatif juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan berimbang.

Selanjutnya, reformasi manajemen kehumasan harus diiringi dengan pembentukan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyampaian informasi publik yang jelas dan mudah diakses. SOP ini perlu dirancang agar setiap proses komunikasi publik, baik dalam bentuk penyampaian kebijakan, program pembangunan, maupun laporan keuangan dan kegiatan daerah, dapat disajikan dengan transparan, akuntabel, dan mudah dipahami masyarakat.

Diperlukan juga penguatan fungsi monitoring dan evaluasi dari lembaga internal maupun eksternal, termasuk keterlibatan Badan Publik Pengawas Keterbukaan Informasi dan Ombudsman Daerah, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi benar-benar dijalankan secara berkesinambungan. Penguatan ini mencakup pula mekanisme pengaduan

masyarakat terhadap pelayanan informasi yang buruk, dan tindak lanjut dari setiap laporan harus didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.

Langkah strategis lain yang patut dipertimbangkan adalah penyelenggaraan forum dialog publik secara berkala yang mempertemukan pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan informasi, klarifikasi isu, serta menerima masukan langsung dari masyarakat. Forum semacam ini tidak hanya menjadi wadah komunikasi dua arah, tetapi juga sarana meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga dalam pembangunan daerah.

Pada akhirnya, sukses atau tidaknya reformasi keterbukaan informasi sangat bergantung pada kemauan politik dan komitmen moral dari pimpinan daerah. Perlu ditanamkan pemahaman bahwa keterbukaan bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperbaiki pelayanan publik dan membangun kepercayaan rakyat. Dengan penerapan kebijakan keterbukaan informasi yang terarah, didukung sumber daya yang memadai, serta budaya birokrasi yang melayani, maka transparansi informasi di Kabupaten Pohuwato bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan secara nyata dan menyeluruh.

Dengan demikian, saran utama yang diajukan adalah pentingnya membentuk unit layanan informasi publik yang berdiri secara mandiri namun terkoneksi dengan seluruh OPD, yang dapat bertindak sebagai pusat informasi resmi dan sumber edukasi publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.

## REFERENSI

- Amelia Suci Pertiwi, & Dety Mulyanti. (2023). Theoretical Review Study: Peran Dan Fungsi Manajemen Dalam Mengelola Bisnis Online Shop. *Jurnal Kewirausahaan Dan Manajemen Bisnis: Cuan*, 1(1), 47–53. <https://doi.org/10.59603/cuan.v1i1.16>
- Bagaskara, D. Y., & Rohmadi, R. (2024). Analisis SWOT potensi halal tourism di Indonesia dengan NVivo: Studi literature review. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.53088/jerps.v4i1.784>
- Berliani, D., Noviyanti, Keristanti, R., Juliani, W., & Dongoran, F. R. (2024). Peran Audit Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Instansi Pendidikan. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 723–731. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1349>
- Imam Zuhri, Muhammad Sholeh Wafie, Ahmad Jalaluddin, & Yuniarti Hidayah Suyoso Putra. (2024). Analisis SWOT Potensi KPR Syari'ah di Indonesia dengan NVivo : Tinjauan Literatur Review. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 12(2), 310–329. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v12i2.1632>
- Muan Ridhani Panjaitan, & Yuna Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2560>

- Santri, R., Ayu, A. J., Siregar, F. A., Saputra, R. A., Kurniawan, A., & Pane, S. G. (2023). Analisis Daya Saing Industri Koran di Kota Medan (Pendekatan SWOT). *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1676–1688. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5743>
- Sekedang, Y. Y., & Napitupulu, I. H. (2025). Peran Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Perguruan Tinggi: Studi Kasus Implementasi E-Government di Politeknik Negeri Medan. *KIRANA : Social Science Journal*, 2(2), 39–47. <https://doi.org/10.61579/kirana.v2i2.375>
- Syahdiyah Sugiartia, W. (2023). ANALISIS SOAR (STRENGTH, OPPORTUNITY, ASPIRATION & RESULT) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENJUALAN MELALUI DIGITAL MARKET. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(2), 25–34. <https://doi.org/10.55606/jimak.v2i2.1431>
- Wakhidah, U. S., & Nina, O. (2024). Peran Humas dalam Meningkatkan Citra Sekolah. *Business and Accounting Education Journal*, 5(2), 325–340. <https://doi.org/10.15294/baej.v5i2.12967>
- Zainuri, R., & Budi Setiadi, P. (2023). TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS: ANALISIS SWOT DALAM MANAJEMEN KEUANGAN PERUSAHAAN. *JURNAL MANEKSI*, 12(1), 22–28. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i1.1364>